IMPLEMENTASI SISTEM QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR (QRIS) TRANSPORTASI UMUM TRANS BATAM

SKRIPSI

Oleh:
Nur Azlan
171010057

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2022

IMPLEMENTASI SISTEM QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR (QRIS) TRANSPORTASI UMUM TRANS BATAM

SKRIPSI

Uuntuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Nur Azlan
171010057

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Nur Azlan
NPM	: 171010057
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Transportasi Umum Trans Batam"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

29 Juli 2022

Nur Azlan
171010057

IMPLEMENTASI SISTEM QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR (QRIS) TRANSPORTASI UMUM TRANS BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Nur Azlan
171010057

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tangal
Seperti tertera di bawah ini

Batam, 29 Juli 2022

Lubna Salsabila, S.IP.,M.I.P.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Sistem Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) Di Transportasi Umum Trans Batam. QRIS merupakan alat pembayaran non tunai yang berbasis digital menggunakan smartphone dan alat scan barcode dan dilakuakan secara online dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik namun apa yang menjadi harapan dan tujuan utamanya belum tercapai, hal ini di karenakan masih ada beberapa halte yang tidak memiliki loket pembelian tiket, petugas masih melayani pembayaran secara manual serta adanya beberapa faktor penghambat implementasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Metode ini digunakan agar bisa menjelaskan masalah yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan penumpang trans batam yang belum mendapatkan informasi mengenai program yang di terapkan, petugas masih melayani pembayaran secara tunai, partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan kendala secara teknis maupun non teknis dan beberapa faktor penghambat implementasi yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi.

Kata Kunci : Implementasi, QRIS, Transportasi Umum

ABSTRACT

This study sought to determine how the Indonesian Standard Quick Response Code System (QRIS) was implemented in Trans Batam Public Transportation. QRIS is a digital-based non-cash payment tool that uses a smartphone and a barcode scan tool and is conducted online in its implementation it has been going well but the expectations and main goals have not been met, this is because there are still a number of bus stops that do not have ticket purchase counters, officers still serve payments manually, and there are a number of factors that impede implementation. In this study, the researcher employed a qualitative, descriptive research methodology. This strategy is utilized in order to explain the occurrence of problems in a methodical, factual, and accurate manner based on the facts of the area. Researchers found that trans Batam passengers had not received information about the implemented program, that officers still served cash payments, that community participation remained low, and that implementation was hindered by technical and non-technical constraints, policy content, information, support, and potential sharing.

Keywords: Implementation, QRIS, Public Transportation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP
4. Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P. selaku dosen pembimbing skripsi pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
5. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing akademik.
6. Dosen Program Studi Administrasi Negara, serta seluruh Dosen dan staf Universitas Putera Batam.
7. Kepala Dinas serta Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
8. Kabid serta Pegawai UPT Pelayanan Jasa Transportasi Umum Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam.
9. Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendukung dan membantu saya selama masa perkuliahan.
10. Kakek dan Nenek, serta keluarga besar yang selalu mendukung memberi semangat dan nasihat buat saya selama berkuliah.
11. Sahabat dan teman terdekat yang selalu bersama semasa perkuliahan Abang Deza, Danu, Risman, Singgih, Dicky, Eka, Rani.
12. Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2017 yang selalu membantu, berbagi informasi, memberi semangat, serta kompak dalam berbagai hal selama masa perkuliahan.

13. Tri Juniati Tan dan Anju Indriani yang memberikan dukungan moril dan meluangkan waktu untuk memberi masukan, pengalaman, dan membantu berbagai hal mengenai skripsi kepada penulis.

14. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu terseselesainya Skripsi ini

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin

Batam, 29 Juli 2022

Nur Azlan

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....**Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PENGESAHAN .....**Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 6
1.3. Batasan Masalah 7
1.4. Rumusan Masalah 7
1.5. Tujuan penelitian 7
1.6. Manfaat Penelitian 8
BAB II 9
LANDASAN TEORI 9
2.1. Teori Dasar 9
2.1.1. Kebijakan Publik 9
2.1.2. Implementasi 10
2.1.3. E-Goverment 16

2.1.4. QR CODE (Quick Response Code) 19
2.1.5. Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) 21
2.2. Penelitian Terdahulu 21
2.3. Kerangka Pemikiran 26
BAB III 27
METODOLOGI PENELITIAN 27
3.1. Jenis Penelitian 27
3.2. Fokus Penelitian 27
3.3. Sumber Data 27
3.4. Teknik Pengumpulan Data 28
3.5. Metode Analisis Data 29
3.6. Keabsahan Data 30
3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian 31
BAB IV 32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
3.1. Gambaran Umum 32
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Batam 32
4.1.2. Kondisi Umum Pelaksanaan Sistem QRIS Di Transportasi Umum Transbatam 34
3.2. Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Transportasi Umum Trans Batam 37
4.2.1. Faktor Penghambat keberhasilan Implementasi 43
3.3. Pembahasan 48
4.3.1. Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Transportasi Umum Trans Batam 48
4.3.2. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Transportasi Umum Trans Batam 50
BAB V 53
KESIMPULAN DAN SARAN 53
5.1 Kesimpulan 53

5.2 Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55
Lampiran: 1. Pendukung penelitian
2. List Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Surat Izin Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model hubungan Antar variabel Implementasi Kebijakan Edward III..... 12
Gambar 3.1 Analisis Data 29
Gambar4.1 Struktu Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam..... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penumpang non-tunai Trans Batam 2021 5
Tabel 1.2 Data Jumlah Penumpang TunaiTrans Batam 2021 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3.1 Jumlah Informan 28
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian..... 31
Tabel 4.1 Jumlah Penumpang Trans Batam tahun 2021 35
Tabel 4.2 Jumlah Pengguna QRIS 36

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran..... 26

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang di dunia sangat pesat hal ini memungkinkan berbagai hal menjadi lebih mudah dan praktis. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus melakukan inovasi dalam bidang teknologi dan informasi secara maksimal dengan menerapkan sistem pelayanan berbasis digital/*online* guna mempermudah penyampaian informasi, komunikasi serta interakasi terhadap masyarkatnya (Putra & Maesarini, 2018). Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mana pemerintah sebagai penyedia jasa layanan harus mampu bekerja secara cepat, tepat serta bisa memberikan kepuasan atas layanan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarkat merasa terlayani dengan baik dan merasakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Penjelasan mengenai pelayanan publik tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan peduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang di bentuk

menurut undang-undang kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk menurut undang-undang dalam sebagai aktivitas pelayanan publik.

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik terus berupaya meningkatkan kualitas dibidang pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat cepat seperti sekarang yaitu dengan menerapkan sistem pembayaran digital berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebanyak 48 penyelenggara jasa layanan metode pembayaran yang sudah memiliki izin melakukan aktivitas transaksi non tunai yang terdiri atas 14 perbankan serta 34 non perbankan. Berbagai jenis metode pembayaran non tunai yaitu kartu atm/debit, kredit, cek, wesel, danu uang digital. Menurut data yang di keluarkan Indonesia Bank 2019, jumlah terbanyak pembayaran non tunai yaitu uang elektronik dengan 95.75 Triliyun mengalami kenaikan sebelumnya 60,00 triliun di tahun 2018. (Sihaloho, Ramadani, & Rahmayanti, 2020)

Meningkatnya pembayaran menggunakan uang elektronik non tunai disebabkan meningkatnya bahan uang digital yang di luncurkan seperti E-money berbentuk chips, link, berbentuk e-commerce, akun bank. Bank Indonesia sebagai penyelenggara metode transaksi di Indonesia bulan Agustus tahun 2019 menerbitkan kanal pembayaran berbasis server yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Semenjak di terbitkan pengguna QRIS di indonesia mencapai 5,8 juta merchant, ini menujukkan keseriusan pemerintah mengembangkan sistem pembayaran berbasis digital sejalan dengan itu pada tahun 2021 terjadi peningkatan pengguna QRIS mencapai 12 juta merchant (Suma.id, 2021b). Namun masih terdapat masalah yang sering di keluhkan oleh pedagang

yang menggunakan QRIS sebagai alat transaksi yaitu adanya ketidakpuasan pedagang umkm mengenai bayaran merchant discount rate sebanyak 0.6 persen di berlakukan kepada penjual yang membuat pendapatan harian mereka berkurang (Sihaloho et al., 2020). Pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan QRIS di indonesia agar kemajuan di sektor ekonomi semakin maju dan tentunya mempermudah proses layanan dalam bertransaksi secara digital.

Sejalan dengan tujuan tersebut pemerintah terus mensosialisasikan QRIS kepada masyarakat seperti halnya yang di lakukan oleh Perwakilan BI Kepulauan Riau saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Melayu Pesisir di Batam guna mengajak masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Kota Batam untuk beralih menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital karena hingga kini di Kepulauan Riau tercatat 59,130 ribu gerai usaha menengah kecil menengah mikro (umkm) yang menggunakan QRIS atau 54% dari yang di targetkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau (Suma.id, 2021). Kota Batam yang berada di Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling maju di Kepri dengan segala potensi yang dimiliki terus-menerus berbenah dan melakukan perubahan di bidang digitalisasi sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam sedang berupaya menigkatkan kualitas pelayanan di bidang jasa transportasi umum dengan menerapkan sistem e-goverment. Sistem tersebut bertujuan untuk menigkatkan kualitas pelayanan di bagian transaksi pembayaran. Penataan sistem transportasi harus dilakukan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi umum

agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang nyaman dengan pelayanan yang optimal.

Bentuk pelayanan di bidang e-goverment yang di terapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam salah satunya yaitu sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) yang di gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada Tranportasi Umum Trans Batam yang di atur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/1/PDAG/2019 (Tentang Implementasi QRIS pasal 1 angka 4). Program ini adalah penyatuan berbagai macam QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Dengan menggunakan QRIS, sistem pembayaran di Trans Batam tentu akan semakin mudah, masyarakat cukup menggunakan satu barcode, tiket akan langsung keluar.

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) manjadi penting karena dengan sistem QRIS tesebut di harapkan meningkatkan kemudahan dalam pelayanan bertransaksi serta berdampak baik terhadap minat serta partisipasi masyarakat untuk menggunakan Transportasi Umum Trans Batam (Batamtimes.com). Hanya Saja Masih terdapat masalah seperti kurang meratanya fasilitas yang ada di beberapa armada yang ada di Transportasi Umum Trans Batam baik bus maupun di halte seperti kursi tunggu penumpang, Ac, Televisi bahkan toilet umum yang rusak dan kurang memadai untuk digunakan serta adanya halte yang tidak memiliki loket pembelian tiket Trans Batam, petugas/pegawai masih melayani pembelian tiket secara manual dan pembayaran secara tunai, meskipun sudah di terapkannya juga pembayaran menggunakan Brizzi card dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami sitem pembayaran QRIS. Bisa

kita lihat dari data di bawah ini bagaimana jumlah pengguna Transaksi pembayaran non-tunai Brizzi card dengan QRIS .

Tabel 1.1 Data Jumlah Penumpang non-tunai Trans Batam 2021

Bulan	**Jumlah Penumpang Non Tunai**
Januari	4.382
Februari	12.571
Maret	14.968
April	11.294
Mei	6.900
Juni	5.631
Juli	5.375
Agustus	7.848
September	7.558
Oktober	21.452
November	20.332
Desember	0
Total	**118.309**

(Sumber : Dinas Perhubungan, 2021)

Tabel 1.2 Data Jumlah Penumpang TunaiTrans Batam 2021

Bulan	**Jumlah Penumpang**		**Total penumpang Tunai**
	Umum	**Pelajar**	
Januari	86.807	2.757	89.564
Februari	80.531	3.313	83.844
Maret	93.313	6.255	99.568
April	89.556	5.576	95.132
May	87.973	2.117	90.090
Juni	80.634	2.233	82.867
Juli	58.365	1.170	59.535
Agustus	63.633	3.471	67.104
September	78.763	6.423	85.186
Oktober	68.999	9.759	78.758
November	66.223	12.085	78.308
Desember			0
TOTAL	**854.797**	**55.159**	**909.956**

(Sumber : Dinas Perhubungan, 2021)

Dari data diatas terdapat masalah yaitu masih rendahnya jumlah penumpang non tunai di Trans Batam apabila di bandingkan dengan data penumpang Tunai di Trans Batam. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) di transportasi umum Trans Batam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa program sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam belum efektif. Ini menjadi menjadi tantangan untuk aparatur di Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut secara optimal. Sesuai dengan pernyataan yang di atas maka peneliti memberi judul penelitian ini yaitu **"Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Tranportasi Umum Trans Batam"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses penerapan sistem QRIS di transportasi umum Trans Batam diantaranya masih kurang meratanya fasilitas yang tersedia di halte dimana masih terdapat beberapa halte yang tidak memiliki loket tempat pembelian tiket, pelayanan transaksi di transportasi umum Trans Batam masih menggunakan sistem manual, penerapan Sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar)* masih belum optimal, jumlah pengguna Sistem QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standar)* yang masih rendah serta pelayanan yang lamban dalam menggunakan sistem transaksi secara manual dalam transportasi umum Trans Batam.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ini melihat dari beberapa identifikasi masalah yang ada salah satunya yaitu tentang penerapan sistem QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standar)* yang belum optimal supaya penelitian ini lebih mengarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Peneliti berfokus tentang bagaimana Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Tranportasi Umum Trans Batam yang di lakukan oleh pemerintah kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan sebagai berikut :

a) Bagaimana Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) di transportasi umum Trans Batam ?
b) Apa saja faktor penghambat Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) di transportasi umum Trans Batam?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di kemukakan di atas, maka tujuan peneliatian sebagai berikut :

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) di transportasi umum Trans Batam.
b. Untuk medeskripsikan faktor pengambat Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) di transportasi umum Trans Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan yaitu :

a. Secara Teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS).

b. Secara praktis penelitian ini di harapakan mampu memberi masukan bagi pemerintah Kota Batam dan para pihak yang berkaitan dengan Implementasi sistem *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS).

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Kebijakan Publik

Menurut Lemieux (Wahab, 2017) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah produk aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang di lakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Carl J. Friedrick (Suaib Ridha, 2016) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanann usaha kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang di harapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik di buat oleh lembaga yang memeiliki legitimasi dalam pemerintahan (Anggara, 2014:36).

Karakteristik Kebijakan Publik yaitu tindakan yang terencana serta mengarah dan memiliki tujuan, bukan hanya sebagai wujud sikap dan aktivitas destruktif secara acak dan serba kebetulan. Kebijakan pembanggunan maupun

kebijakan sosial pada sistem politik modern, bukan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengara pada tujuan tertentu keputusan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan itu ialah yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula bersifat negatif. (Wahab, 2016: 20-24). Sebuah program kebijakan sekadar akan menjadi catatan elit, kalau program tersebut tidak diimplementasikan. Penetapan program kebijakan yang sudah diputuskan untuk alternatif pemecahan masalah wajib diimplementasikan, yaitu diterapkan lembaga administrasi pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang sudah diambil diterapkan oleh bagian adminstrasi yang mengakomodir sumber daya finansial dan manusia. Dalam tahap implementasi bermacam-macam kepentingan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, sebagian juga ditentang para pelaksana.

2.1.2. Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyedikan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Anggara, 2014).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah

atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam arti luas, implementasi juga dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (s*takeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki

a. Model-Model Implementasi

1. Model Charles O. Jones

Menurut Charles O. Jones (Tahir, 2014) Implementasi kebijakan adalah sesuatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program untuk menoperasikan sebuah program dengan memperatikan tiga aktiitas utama kegiatan.

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program baerjalan .
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat ditearima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan degan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

2. Model Weiner dan Vinning

Menurut Weiner dan Vinning (Anggara, 2014) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberasilan implementasi suatu program, sebagai berikut :

a) Logika kebijakan

b) Lingkungan tempat kebijakan di operasionalkan

c) Kemampuan implementor kebijakan

3. Model Christoper Hood

Menurut Christoper (Tahir, 2014) implementasi bisa berjalan dengan baik jika kita memperhatikan lima hal berikut ini :

a. Implementasi yang ideal merupakan produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas.

b. menentukan tujuan dengan jelas dan norma yang ditegakkan

c. Orang-orang yang di pastikan melaksanakan hal-hal yang diminta.

d. Komunikasi yang berjalan sempurna di internal organisasi.

e. Tidak di tekan oleh implementor.

b. Indikator Implementasi

Menurut Edward III (Tahir, 2014) ada empat variabel dalam menentukan keberhasilan Implementasi, adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keseluruhan indikator saling memiliki hubungan dan saling memengaruhi dalam menetukan keberhasilan implementasi.

Gambar 2.1 Model hubungan Antar variabel Implementasi Kebijakan Edward III

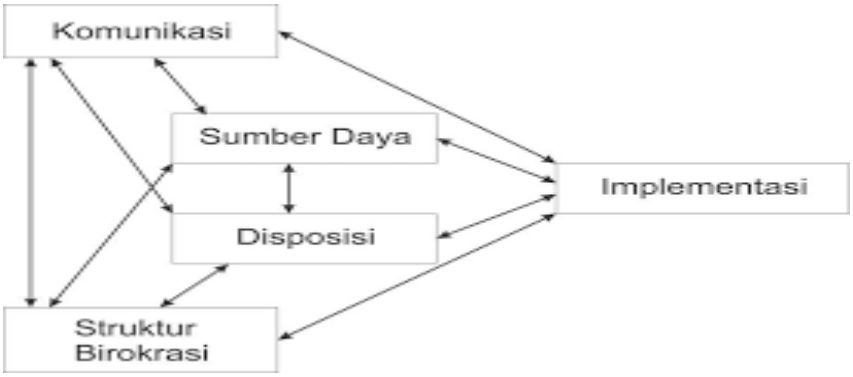

(Sumber : Anggara, 2014 : 250)

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peran/fungsi yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal yang menjadi kelemahan dalam proses kebijakan publik terutama di Indonesia, yaitu masalah implementasinya. Komunikasi yang lemah merupakan penghambat. Lemahnya komunikasi sebetulnya bukan Cuma pada implementasinya, namun bisa juga terjadi ketika formulasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam Implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

1) Karyawan, punya kemampuan sesuai dengan kebutuhan.
2) Informasi, berisi bagaimana kebijakan tersebut di terapkan
3) Kewenangan yang sesuai dengan isi kebijakan
4) Fasilitas fisik berkaitan dengan alat pendukung penerapan kebijkan yang termasuk sarana dan prasarana serta fasilitas yang lengkap.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen penyelenggara dalam kebijakan maupun program yang diterapkan sebab semua kebijakan mememerlukan penyelenggara–penyelenggara yang mempunyai tekad kuat serta komitmen yang tinggi untuk bisa memenuhi sasaran kebijakan. Ada tiga unsur utama yang

memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1) Kognisi adalah tentang pengetahuan pemangku kebijakan tentang penafsiran sasaran kebijakan yang oleh penyelenggara kebijakan.
2) Informasi dan Respon Pelaksana yang termasuk keterbukaan, dan tidak berpihak serta tidak menerima dan menolak penyelenggara dalam menyikapi kebijkasanaan.
3) Reaktif dan bergerak cepat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Edwards III merupakan prosedur kerja di buat dalam mengatur penerapan suatu kebijakan. Yang mengutamakan mengenai *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam mengelola alur pekerjaan antar penyelenggara, lebih lagi saat penerapan kebijakan tersebut tidak hanya bekerja pada satu institusi. menurutnya ada saatnya fragmentasi dibutuhkan saat penerapan kebijakan membutuhkan ketika program melibatkan lebih dari satu institusi dalam mencapai tujuan.

c. Faktor Penghambat Keberhasilan Implementasi

Ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi diantaranya:

1. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik gagal di sebabkan oleh isi kebijakan yang sama, yaitu tujuan dari implementasi tidak spesifik, penerapannya belum menjadi yang utama atau kebijakan tersebut terlalu umum atau tidak ada. selanjutnya, kurangnya penetapan internal dan eksternal dari kebijakan yang di terapkan.

Kemudian, adanya kekurangan dari kebijakan yang akan di implementasikan kebijakan yang akan di implementasikan. Yang terakhir, kegagalan di sebabkan oleh kurangnya sumber daya pendukung pada implementasi kebijakan publik, contah mengenai sumber daya manusia, anggaran, dan aktu.waktu.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik berasumsi bahwa semua pihak yang terjun langsung memiliki informasi mengenai Implementasi harus bisa melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan hal tersebut dengan baik malah tidak tersampaikan dan menjadikan informasi tidak ada, dikarenakan mengalami gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Penerapan suatu kebijakan publik itu sangat sulit ketika pengimplemetasiannya kurang mendapat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Kegagalan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari segi pembagian potensi dari aktor yang berkaitan dengan implementasi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan tugas serta wewenang dari pelaksana. Struktur organisasi pelaksana bisa menjadi masalah jika pembagian wewenang serta tanggung jawab tidak sesuai dengan tugas di sebabkan adanya batasan-batasan yang tidak jelas.

Kebijakan publik bisa efektif jika diterapkan dan memiliki manfaat positif untuk masyarakat. Dengan demikian tindakan dan perbuatan masyarakat harus sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dan apabila sikap dan

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak efektif.

2.1.3. E-Goverment

E-Goverment adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar diarapkan meningkatkan perormance pemerintah dan memenuhi ekspektasi masyararkat akan peningkatan kualitas pemerintahan (Salsabila & Purnomo, 2018). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik harus adanya keberanian inovasi dalam birokrasi dan pentingnya introduksi IT (*Information Tecnology*) untuk perbaikan sistem pelayanan, peningkatan produktifitas, dan efisiensi.

Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan harapan memperbaiki kualitas layanan publik berasaskan *Good Governance* (Salsabila & Purnomo, 2018). Penyediaan sumber daya, aturan, pembiayaan, sarana dan prasarana merupakan penting dipersiapkan di penerapan egovernment. Pelayanan publik sekarang cukup baik. Upaya mengembangkan E-government serius dijalankan dilingkungan birokrasi publik. Di kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten menerapkan e-government pada sistem pemerintahan harus diperhatikan serta penting untuk dikembangkan.

Aturan mengenai tata kelola e-government terdapat pada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan,

pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Dalam Intsruksi Presiden No 3 Tahun 2003 memiliki tujuan strategis e-government harus dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapantahapan yang realistik dan terukur.

a. Tahapan e-Government

Menurut (Aprianty, 2016) tahapan perkembangan implementasi egovernment di Indonesia, dibagi menjadi empat :

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang

ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi Email dalam website pemerintah.

3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Ada beberapa unsur keberhasilan e-goverment yang perlu dilihat unsur-unsur sukses tersebut diantaranya :

1. Dukungan merupakan unsur sangat penting dalam mengembangkan e-government perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep e-government dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan egovernment dapat terlaksana.
2. Kapasitas unsur kapasitas menjadi sumber daya sangat dibutuhkan sebagai pembangunan dan pengembangan e-government supaya rancangan yang sudah di buat dapat menjadi kenyataan. Ada tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:
   a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government.
   b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan egovernment.

c) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

3. Nilai unsur nilai berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat .*e-goverment* adalah masyarakat sebagai penerima layanan. (Aprianty, 2016)

2.1.4. QR CODE (Quick Response Code)

Quick Response Code atau yang lebih di kenal dengan QR Code adalah barcode dua dimensi yang diterbitkan Perusahaan asal Jepang Denso Wave di tahun 1994. Model barcode ini pertama kali digunakan sebagai pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan namun sekarang mulai dimanfaatkan dalam banyak bidang pelayanan bisnis dan jasa sebagai aktivitas marketing dan promosi. Pertama kali QR Code dimungkinkan sebagai suatu kode yang isinya dapat menerjemahkan transmisi kecepatan tinggi.

Kelebihan dari QR Code yaitu bisa menampung data baik horizontal maupun vertikal. Dalam hal ini, QR Code dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar daripada barcode satu dimensi. Sekarang, dalam penggunaan QR Code sudah di terapkan dalam wujud aplikasi QR Code Reader dan QR Code Generator, hal tersebut memberi kemudahan informasi dalam bentuk QR Code dan menemukan informasi yang diinginkan, proses kerjanya yaitu scanning dan pemindaian data menggunakan media dari kamera handphone

Pada bidang layanan bisnis, QR Code sudah sering diterapkan pada perusahaan industri jasa layanan tertentu yang meneruskan penggunanya kepada alamat URL yang diinginkan, seperti QR Code pada surat kabar, brosur, media sosial dan media informasi lainnya, dimana QR code tersebut menerjemahkan berbagai hal yang ingin dikirimkan oleh perusahaan ataupun penyedia jasa layanan melalui situs yang sudah tersedia.

QR Code merupakan susunan kotak persegi dalam suatu pola lebih besar, yang disebut sebagai modul. Quick Response Code (QR Code) mempunyai manfaat yang terdapat pada QR Code menurut (Sihaloho et al., 2020) yaitu:

1) Kapasitas tinggi dalam menyimpan data yang berkapasitas 7.089 angka.
2) Ukuran yang kecil sebuah QR Code bisa menampung jumlah data yang sama jumlahnya dengan barcode satu dimensi.
3) Mampu meperbaiki kesalahan pada tingkat koreksi yang ingin di perbaiki data yang terdapat di QR mampu memperbaiki tingkat kerusakan hingga 30% dan menerjemahkannya secara baik.
4) Jenis data QR Code dapat mengatur angka, huruf, simbol, karakter bahasa asing serta data biner.
5) Kompensasi distorsi QR Code mampu menerjemahkan permukaan melengkung atau menyimpang.
6) Kemampuan menghubungkan Sebuah QR Code dapat diklasifikasikan mejadi simbol yang lebih kecil agar sesuai dengan ruang. Simbol-simbol kecil yang dibaca sebagai kode tunggal apabila di scan menurut urutan.

2.1.5. Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)

QR Code Indonesian Standar merupakan metode pembayaran berdasarkan kode berbetuk kotak seperti labirin yang menjadi acuan proses pembayaran menggunakan QR Code. Metode ini mulanya dirintis Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) .Standar Internasional EMV Co (*Europe Master Card Visa)* dipakai menjadi tolak ukur mengenai susunan QRIS. Hal tersebut dipakai agar terhubung interkoneksi dan interoperabiltas antar penyelenggara, instrumen, negara supaya bersifat terbuka dalam (Ronabliya, Azizah, Abdillah, & Firmansyah, 2021). Setelah model QRIS Merchant ada tidak banyak aplikasi pembayaran yang digunakan, cukup menggunakan satu QR Code saja, serta bisa di-scan oleh pengguna di aplikasi pembayaran pada smartphone.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada pun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Lubna Salsabila 2021	How Jakarta Public Transport Uses Social Media Platforms and as an Air	Qualitative	- The level of information dissemination in Jakarta during the COVID-19 epidemic was different.

		Pollution Control Project?		- The KAI Commuter Twitter account is the most active in terms of information sharing.
2	Hendriyanto Putra 2019	Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City Berbasis Qlue Dan Crop Di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur	Kualitatif	- Penerapan Jakarta Smart City Bebasis Qlue dan Corp sudah berjalan dengan baik. -Unit Qlue menerima laporan masyarakat dengan cepat. - Warga lebih mudah mengakses aplikasi corp dan membuat laporan.
3	Mustamin H. Idris 2019	Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram)	Kualitatif	- Pengoperasian Bus Trans Batam belum berjalan efektif. - Komunikasi, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. - Sumber daya, dan perangkat organisasi implementor sudah

				memadai namun dalam pelaksanaanya belum, optimal. - Disposisi, berkaitan dengan sikap dan konsistensi pelaksana terkesan mengabaikan kebijakan tersebut. - Struktur birokrasi, implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
4	Josef Eva Sihaloho 2020	Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan Umkm Di Medan	Kualitatif	Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan Umkm Di Medan belum berjalan dengan baik.

5	Rifqi Nabil Ronabliya 2020	Implementasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart terhadap pendapatan UMKM di masa pandemi covid 19	Kualitatif	- Implementasi QRIS sudah berjalan dengan baik. - Namun masih terdapat kendala seperti jaringan internet dan biaya *merchant discount rate* sebesar 0,6% yang di berlakukan kepada para pedagang.
6	Sigit Haryono 2010	Analisis kualitas pelayanan angkutan umum (bus kota) di kota yogyakarta	Kuantitatif	Analisis kualitas pelayanan angkutan umum (bus kota) di kota yogyakarta masyarakat belum merasa puas dengan pelayanan angkutan umum (bus kota) dikota yogyakarta.
7	Mohamad Mizan Sya'roni 2021	Implementasi sistem pembayaran quick response indonesian standard dalam	Kualitatif	Implementasi sistem pembayaran quick response indonesian standard dalam

		pendekatan asset-bassetcommunity development (abcd)bagi pembangunan umkmdesa kondang sari kecamatan beberkabupaten cirebon.		pendekatan asset-bassetcommunity development (abcd)bagi pembangunan umkmdesa kondang sarikecamatan beberkabupaten cirebonsudah berjala denagn baik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang urgent (Pasolong, 2013).

Bagan 2.3.1 Kerangka Pemikiran

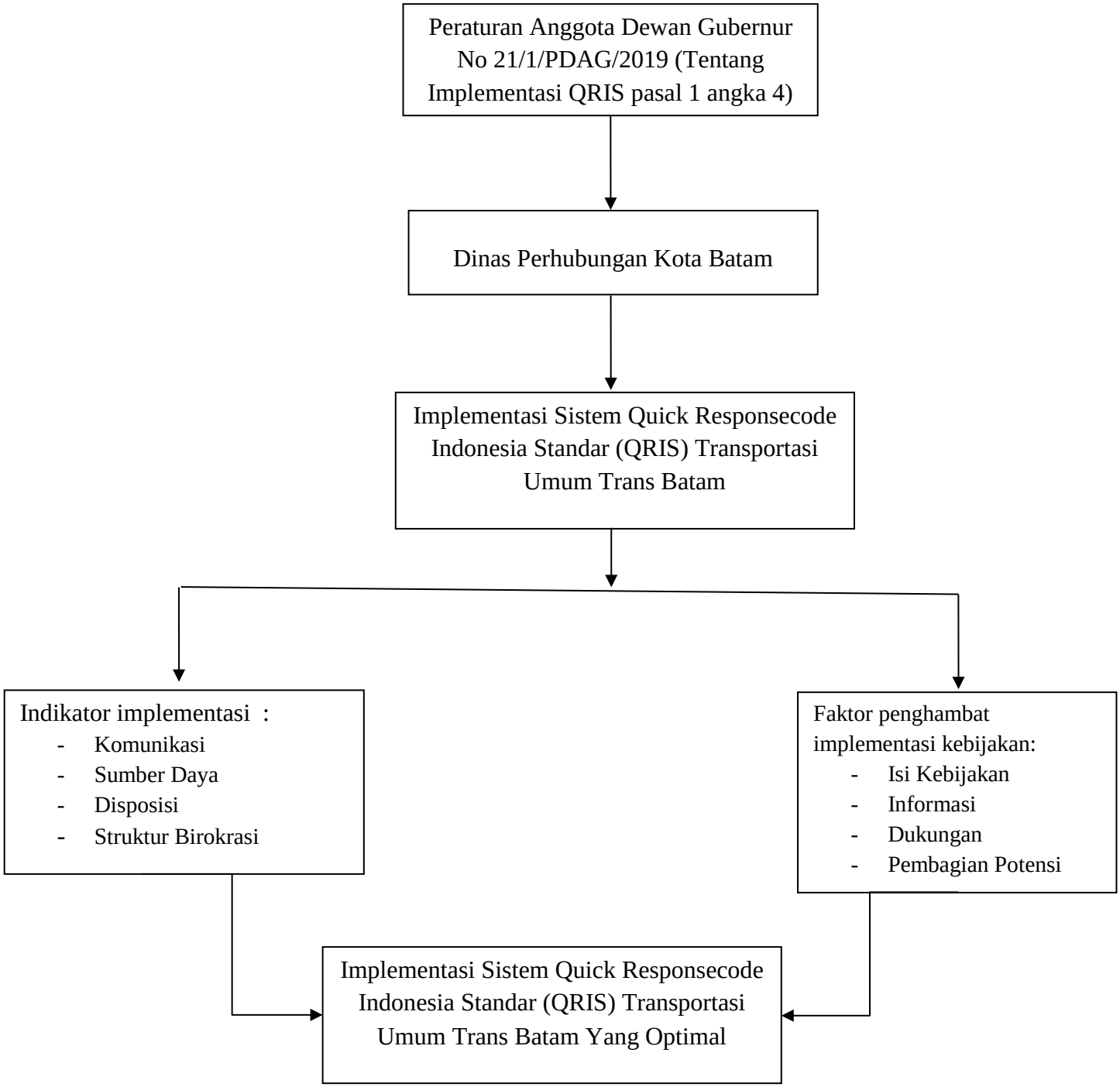

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi saat penelitian di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada dalam (Pasolong, 2013). Dengan menggunakan pendekatan deskritif yaitu melakukan wawancara mendalam, dan menggambarkan pelaksanaan penerapan sistem *Quick Responsecode Indonesian Standar* (QRIS). Yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data-data dan fakta-fakta untuk mendukung penelitian ini.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sendiri bertujuan untuk untuk mengetahui tentang Implementasi *Sistem Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) Di Transportasi Umum Trans Batam sehingga Dinas Perhubungan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan Masyarakat bisa terlayani dengan baik.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2016), dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Sumber-sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
b. Dokumen, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
c. Tempat dan peristiwa, sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Transportasi Umum Trans Batam.

Tabel 3.1 Jumlah Informan

No	Nama	Jabatan/Profesi	Instansi
1	M. Hayqal	Staff Ahli QRIS	Dinas Pergubungan
2	Reni Meisiasari	Petugas E-ticket	Dinas Perhubungan
3	Putra Hidayat	Masyarakat	Mahasiswa
4	Nuri Fitria Sari	Masyarakat	Guru
5	Mariana	Masyarakat	Ibu rumah tangga
6	Dinda Nur Afifah	Masyarakat	Guru
7	Muhammad Hafiz	Masyarakat	Karyawan Swasta

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

(Gunawan, 2013), secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

a. Observasi. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan Bus Trans Batam.

b. Wawancara adalah yaitu bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara pewawancara dan narasumber.

c. Dokumentasi. Dokumen merupakan catataan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

Gambar 3.1 Analisis Data

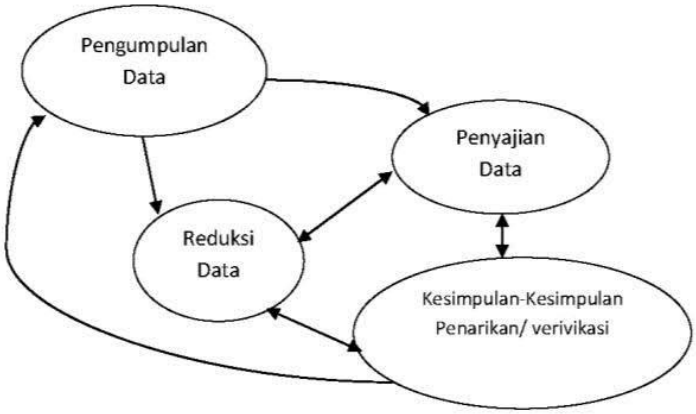

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya meringkas, mengambil hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang krusial, mencari topik dan gambarnya. Selanjutnya data yang sudahdireduksi menghasilkan gambar dengan sangat jelas, serta memberi

kemudahan peneliti dalam mengolah data berikutnya, serta menemukannya saat diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Data yang disajikan pada penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan, daftar, klasiikasi,serta bagan arus. Dalam penyajian data kualitatif yang biasa di tampilkan adalah teks yang bersiat naratif.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan adalah penemuan baru yang tidak ada sebelumnya. Penemuan tersebut bisa berbentuk pengambbaran sebuah objek yang belum jelas atau samar-samar atau gelap dan sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori.

3.6. Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data dibutuhkan metode pemeriksaan. Metode yang di pakai adalah tingkat kepercayaan, keteralihan, keberkaitan, dan kepastian dalam (Moleong, 2011) .

a. Tingkat kepercayaan barometer berperan menjalankan instruksi agar tingkat kepercayaan temuan tercapai, memperlihatkan tingkat kepercayaan hasil temuan peneliti membuktikan pada saat penelitian.

b. Keteralihan adalah persoalan empiris dalam persamaan kerangka pengirim dan penerima. Dalam melaksanakan pengalihan peneliti harusnya mencari dan mengumpulkan peristiwa empiris mengenai persamaan konteks. Selanjutnya peneliti bertanggung jawab dalam pengadaan data deskriptif.

c. Kebergantungan merupakan konsep yang lebih luas bisa dilihat daritinjauan

bahwa konsep itu mempertimbangkan banyak hal, yaitu yang ada pada kebergantungan itu sendiri dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

d. Kepastian bermula dari memastikan bahwa sesuatu itu objektif dan tidak terikat dengan persetujuan beberapa orang kepada pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Bisa di bilang pengalaman orang tersebut subjektif dan apabila di di setujui beberapa atau banyak orang, maka bisa di sebut objektif. Maka objektivitas maupun subjektivitasnya sesuatu bergantung pada orang.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi

Penelitian ini betempat di Jl. Jendral Sudirman No 2, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat dilakukan dengan baik.

b) Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka																								
2.	Pengumpulan Data																								
3.	Pengolahan Data																								
4.	Analisis dan Kesimpulan																								
5.	Penyusunan Jurnal																								
6.	Penyerahan Jurnal																								

UPB

Universitas Putera Batam